

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN
WISATA TANI SEBAGAI PROGRAM INOVASI DESA DI
DESA MELATI II KECAMATAN PERBAUNGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

OLEH:

WIKA AUDREY

188520038



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN
WISATA TANI SEBAGAI PROGRAM INOVASI DESA DI
DESA MELATI II KECAMATAN PERBAUNGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

OLEH:

WIKA AUDREY

188520038

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/9/22

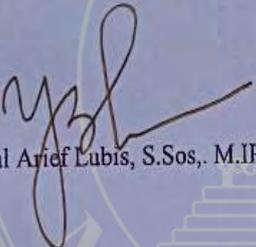
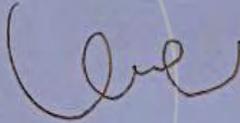
Access From (repository.uma.ac.id)26/9/22

LEMBAR PENGESAHAN

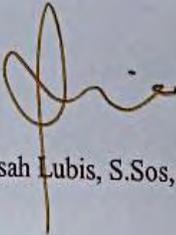
Judul : Peranan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan *Wisata Tani*
Sebagai Program Inovasi Desa Di Desa Melati II Kecamatan
Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera
Utara

Nama : Wika Audrey
NPM : 188520038
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Yurial Arief Lubis, S.Sos., M.IP	Evi Yunita Kurniaty, S.Sos., M.IP

Mengetahui

 Dekan  Dr. Effiati Hasibuan, M.Si	Ka. Program Studi  Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol
--	--

Tanggal lulus: 10 Agustus 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun beberapa bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, jika dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2022



Wika Audrey

188520038

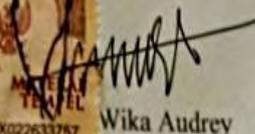
**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPANTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wika Audrey
NPM : 188520038
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Peranan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Wisata Tani Sebagai Program Inovasi Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2022

Wika Audrey
188520038

ABSTRAK

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN WISATA TANI SEBAGAI PROGRAM INOVASI DESA DI DESA MELATI II KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

Program Inovasi Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Republik Indonesia adalah sebagai upaya untuk memperbaiki desa-desa yang tertinggal. Melalui Program Inovasi Desa ini Kementerian Desa Republik Indonesia menyalurkan berupa bantuan dana untuk meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh desa-desa. Desa Melati II terverifikasi mendapat bantuan tersebut dan pemerintah desa Melati II memodifikasi tempat yang bernama Panteng Kleset untuk dijadikan sebagai destinasi wisata tani. Oleh karena itu, diperlukan adanya peranan dari pemerintah desa dan peranan dari masyarakat untuk mewujudkan wisata tani sebagai Program Inovasi Desa. Namun, seiring dengan berjalannya waktu Panteng Kleset yang sudah selesai dibangun dan dinikmati oleh para wisatawan mengalami permasalahan yang membuat Panteng Kleset harus tutup dan terjadi kerusakan di beberapa fasilitas yang tersedia. Dalam memecahkan permasalahan yang terjadi, peneliti menggunakan teori peranan yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dan teori kebijakan yang dikemukakan oleh Carl J. Friedrich. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan bagaimana peranan pemerintah desa dalam mewujudkan wisata tani sebagai program inovasi desa. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa peranan pemerintah desa belum dikatakan baik dikarenakan adanya ketidaksempurnaan seperti, pemberian pengarahan, sosialisasi, bimbingan kepada masyarakat, dan peran pemerintah dalam mengelola keuangan belum efektif. Peranan pemerintah Desa Melati II belum baik karena tidak memperbaiki akses menuju wisata tani Panteng Kleset. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah munculnya Wabah Covid-19 dan kurang baiknya peranan dari pemerintah Desa Melati II.

Kata kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Program Inovasi Desa

ABSTRACT

ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN REALIZING AGRICULTURE TOURISM AS A VILLAGE INNOVATION PROGRAM IN MELATI II VILLAGE PERBAUNGAN DISTRICT SERDANG BEDAGAI DISTRICT NORTH SUMATERA

The Village Innovation Program issued with the aid of using the Ministry of Villages of the Republic of Indonesia is an attempt to enhance underdeveloped villages. Through this Village Innovation Program, the Ministry of Villages of the Republic of Indonesia distributes economic help to reduce the troubles confronted with the aid of using villages. It changed into validated that Melati II Village acquired the help and the Melati II village authorities changed an area known as Panteng Kleset to function a traveller vacation spot for farmers. Therefore, it's miles vital to have a function from the village authorities and the function of the network to realise farm tourism as a Village Innovation Program. However, over time, Panteng Kleset, which has been finished and loved with the aid of using tourists, has skilled troubles which have compelled Panteng Kleset to shut and a few centers had been damaged. In fixing the troubles that occur, the researcher makes use of the function concept proposed with the aid of using Ryaas Rasyid and the coverage concept proposed with the aid of using Carl J. Friedrick. The form of studies that the researcher makes use of is the usage of a descriptive approach with a qualitative technique to explain how the function of the village authorities in knowing farm tourism as a village innovation program. The effects acquired are that the function of the village authorities has now no longer been stated to be properly because of imperfections which include offering direction, socialization, steerage to the network, and the authorities's function in dealing with price range has now no longer been effective. The function of the Melati II Village authorities has now no longer been properly as it does now no longer enhance get right of entry to to Panteng Kleset farming tourism. The limitations confronted with the aid of using the village authorities are the emergence of the Covid-19 outbreak and the negative function of the Melati II Village authorities.

Keywords: Village Innovation Program, Village Government, Role

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Wika Audrey lahir pada tanggal 13 Oktober 2000 yang sekarang berusia 21 tahun ini merupakan putri kandung dari Bapak Rayendra dan Ibu Nuraidah. Anak sulung dari dua bersaudara ini bertempat tinggal di Dusun Rambe, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Penulis pernah menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Athiyyah di Balai Jaya, Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tahun 2006. Selanjutnya penulis pernah menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri 118435 di Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan dibangku Madrasah Tsnowiyah SKB 3 Menteri Sei Tontong, Melati II, Kecamatan Perbaungan. Dan penulis melanjutkan pendidikan dibangku SMA Negeri 1 Pegajahan, Jalan Besar Desa Bengabing, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Sekarang penulis tercatat sebagai salah satu mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Program Studi Administrasi Publik sejak tahun 2018.

Selama berkuliah penulis banyak mengikuti organisasi kemahasiswaan baik itu organisasi internal kampus maupun organisasi eksternal kampus. Penulis merupakan Kepala Bidang Keagamaan di Himpunan Mahasiswa Almuni SMA Negeri 1 Pegajahan (HIMAS SN1HAN). Serta penulis merupakan Kepala Bidang Manajemen Keilmuan di Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Medan Area (HIMAP UMA) Periode 2020-2021. Selain aktif di beberapa organisasi, penulis juga merupakan seorang penulis antologi dan juga penyiar podcast.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan islam sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan tepat waktu yang berjudul **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Wisata Tani Sebagai Program Inovasi Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara”**. skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak yang telah berpartisipasi. Dengan tersusunnya tugas akhir skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua, yang sudah memberikan dukungan penuh serta selalu melangitkan doa-doa untuk keberhasilan penulis dan wujud nyatanya adalah penulis bisa sampai dititik akhir.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Effiati Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos., M.I.Pol selaku Kepala Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos., M.IP selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan penulis arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan tepat waktu.
6. Ibu Evi Yunita Kurniaty, S.Sos., M.IP selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan penulis arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan tepat waktu.
7. Ibu Zoraya Alfathin Rangkuti, S.Sos., MPA selaku Sekretaris skripsi penulis.

8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang sudah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
9. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
10. Semua Informan yang telah bersedia membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
11. Seluruh Mahasiswa Administrasi Publik yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir skripsi masih banyak ditemukan kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya saran, masukan serta kritikan yang membangun guna membantu penulis untuk terus memberikan yang terbaik. Penulis berharap pembaca dapat menerima manfaat serta pengetahuan baru dari karya ilmiah ini.

Medan, Agustus 2022

Penulis,

Wika Audrey

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Peranan.....	7
2.2 Peran Pemerintah Desa	10
2.3 Teori Kebijakan	12
2.4 Pengertian Desa	14
2.5 Pemerintah Desa	16
2.6 Pengertian Wisata Tani	22

2.6.1 Faktor-Faktor Keberhasilan Agrowisata	24
2.7 Pengertian Program Inovasi Desa (PID)	26
2.7.1 Tujuan Program Inovasi Desa (PID)	28
2.7.2 Manfaat Program Inovasi Desa (PID)	29
2.8 Penelitian Terdahulu	30
2.9 Kerangka Berpikir.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Lokasi Penelitian.....	43
3.3 Waktu Penelitian.....	43
3.4 Informan Penelitian.....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	49
4.1.1 Sejarah Desa Melati II	50
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Melati II	50
4.2 Visi dan Misi Pemerintah Desa Melati II	52
4.2.1 Visi Pemerintah Desa Melati II	52
4.2.2 Misi Pemerintah Desa Melati II	52
4.3 Status Desa Melati II	52
4.4 Destinasi Wisata Tani Di Desa Melati II	53

4.5 Peraturan Desa (Perdes) BPD Melati II	58
4.6 Peranan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Wisata Tani Sebagai Program Inovasi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara	60
4.7 Kendala Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Wisata Tani Sebagai Program Inovasi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	81
6.1 Pedoman Wawancara	81
6.2 Dokumentasi Bersama Informan	83
6.3 Potret Wisata Tani Panteng Kleset	86

DAFTAR BAGAN

	Hal
Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Bagan 4.1 Struktur Pemerintah Desa Melati II	51



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Table 3.1 Waktu Penelitian	43



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1 Wisata Tani Panteng Kleset	55
Gambar 4.2 Palungguhane Tojoyo	56
Gambar 4.3 Kebun Jeruk Petik Sendiri.....	57
Gambar 4.4 Peras Susu Kambing Etawa.....	58
Gambar 5.1 Foto bersama Kepala Desa Melati II	83
Gambar 5.2 Foto bersama Sekretaris Desa Melati II.....	83
Gambar 5.3 Foto bersama Ketua BPD Melati II	84
Gambar 5.4 Foto bersama Sekretaris BUMDesa Madani Melati II	84
Gambar 5.5 Foto bersama Ibu Rismayanti.....	85
Gambar 5.6 Potret Panteng Kleset.....	85
Gambar 5.7 Potret Panteng Kleset.....	86
Gambar 5.8 Potret Panteng Kleset.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU Tentang Desa No. 6 Tahun 2014, dijelaskan pemerintahan desa ini merupakan pelaksanaan segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut UU No. 6 Tahun 2014, pemerintah desa merupakan kepala desa atau disebut dengan nama lain, didukung oleh perangkat desa sebagai unsur perangkat desa. Adanya UU No. 6 Tahun 2014 ini, sebenarnya berupaya untuk lebih memperhatikan desa, mengatur, mengelola, serta menjawab permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh desa serta menjadi kebutuhan pemerintahan desa agar dapat mendorong kemajuan dari desa tersebut.

Dari segi politik, desa merupakan tempat warga negara berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Menurut Pasal I Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa disebut desa dan desa adat atau disebut juga dengan nama lain, desa yang merupakan badan hukum suatu masyarakat dengan batas wilayah yang berwenang untuk urusan pemerintahan dan merupakan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa harus senantiasa diperhatikan dalam setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan nasional. Hal ini dikarenakan bahwa desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan daerah. Banyak sekali

permasalahan-permasalahan desa dipelosok negeri yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Padahal permasalahan desa menjadi suatu permasalahan yang sangat mendasar bagi negara, yang setiap kali digambarkan bahwa desa identik dengan tingkat kemiskinan tinggi, kebodohan dan keterbelakangan.

Jika pemerintah melek terhadap sudut-sudut negeri ini, maka pasti pemerintah akan kagum dengan potensi yang ada pada desa. Potensi yang ada pada desa merupakan suatu potensi yang dapat menjadi basis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pada tujuan yang mulia dari negara ini yaitu “menciptakan masyarakat yang adil dan makmur” yang sudah tertulis dengan jelas pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rahyunir, 2015).

Program Inovasi Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Republik Indonesia adalah bertujuan sebagai upaya untuk memperbaiki desa-desa yang tertinggal. Melalui Program Inovasi Desa ini Kementerian Desa Republik Indonesia menyalurkan berupa bantuan dana untuk meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh desa-desa. Bantuan tersebut merupakan bentuk upaya dari Kementerian Desa Republik Indonesia yang diberikan kepada beberapa desa-desa yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Salah satunya adalah Desa Melati II Kecamatan Perbaungan yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai yang terverifikasi mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa Republik Indonesia. Desa Melati II layak terpilih karena memiliki potensi alam yang lebih. Salah satunya seperti pada tempat yang bernama Panteng Kleset yang merupakan sebuah tempat yang didalamnya terdapat sungai terbentang panjang dan disisi kanan dan kirinya terdapat persawahan milik masyarakat setempat yang menambah keunikan tersendiri dari tempat-tempat

lainnya. Desa Melati II Kecamatan Perbaungan mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa Republik Indonesia senilai Rp. 1.876.718.350 (dilansir dari data Infografis 2021 APBDesa Melati II) dan menjadi pendapatan desa. Dari bantuan yang diberikan, pemerintah desa menyalurkan dana tersebut untuk proses pembangunan desa wisata tani yang berfokus pada Panteng Kleset.

Perlu adanya peranan dari pemerintah desa untuk mengelola Panteng Kleset sebagai destinasi wisata tani. Peranan pemerintah desa memiliki kekuatan tersendiri untuk keberhasilan pembangunan desa yang dilakukan, sebab pemerintah desa merupakan wadah utama dalam proses berjalannya pembangunan desa berbasis pembangunan wisata tani. Tidak hanya menjadi wadah utama, pemerintah desa juga harus memiliki pemahaman serta pertanggungjawaban penuh agar desa yang dikelola dapat menjadi desa sesuai dengan yang diharapkan bersama, yakni membawa desa lebih maju serta dapat meminimalisir keidentikan negatif yang dimiliki oleh desa, seperti kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan. Wisata tani Panteng Kleset menjadi tempat yang dimodifikasi untuk dijadikan sebagai tempat wisata tani berbasis lokal di Desa Melati II.

Harapan masyarakat setempat sangat besar dengan adanya pembangunan wisata tani Panteng Kleset karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat seperti memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan membuka lowongan pekerjaan bagi warga setempat. Karena Desa Melati II merupakan desa yang dapat dikatakan sebagai desa yang memiliki tingkat pengangguran tinggi serta tingkat pendidikan rendah.

Dengan ini, peranan dari pemerintah desa dalam mewujudkan wisata tani sebagai program inovasi desa yang telah diterbitkan oleh Kementerian Desa

Republik Indonesia harus segera dilaksanakan. Peranan pemerintah desa dan peranan masyarakat sekitar harus dapat terjalin dengan baik agar dalam mengelola Panteng Kleset menjadi destinasi wisata tani sesuai dengan harapan bersama. Namun sangat disayangkan, seiring dengan berjalannya waktu perkembangan Panteng Kleset setelah selesai dibangun kini sudah tidak beroperasi lagi, belum diketahui pasti apa penyebabnya, maka dengan itu Penulis tertarik ingin mengetahui lebih lanjut tentang: **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Wisata Tani Sebagai Program Inovasi Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara”**.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka masalah tersebut merupakan rumusan masalah yang akan dibahas dan dijawab oleh penelitian ini:

1. Bagaimana peranan pemerintah desa dalam mewujudkan wisata tani sebagai Program Inovasi Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa yang menjadi kendala pemerintah desa dalam mewujudkan wisata tani Panteng Kleset?

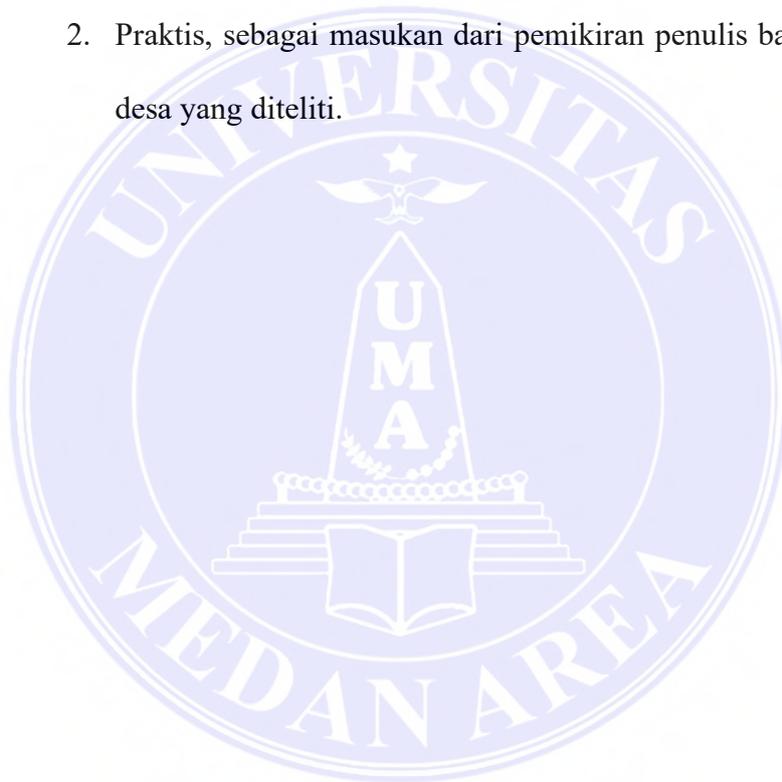
1.3 Tujuan Penelitian

Semua penelitian masalah membutuhkan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, adapun tujuan penelitian untuk mencaeritahu peranan pemerintah desa dalam mewujudkan wisata tani sebagai program inovasi desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara serta untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pemerintah desa dalam mewujudkan wisata tani Panteng Kleset.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Subyektif, sebagai langkah untuk melatih, mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah dan kemampuan menuliskan dalam bentuk penelitian ilmiah yang berdasarkan pada teori administrasi publik.
2. Praktis, sebagai masukan dari pemikiran penulis bagi pemerintah desa yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Peranan dikemukakan oleh Dahlan (1999:5) bahwa peranan berasal dari kata peran. Sebuah peranan memiliki arti sebagai tindakan atau pemain atau bertindak. Dalam konteks kelembagaan lainnya, peranan merupakan aspek dinamis dari suatu lembaga, atau peranan mewakili tata institusional (*institutional order*) dari suatu lembaga (dalam hal ini pemerintah) Berger dan Luckmann (1982:92) menyatakan bahwa peranannya adalah kinerja misi oleh pemerintah. Sebuah peranan memiliki fungsi posisi atau bagian dari suatu kedudukan. Sebaliknya, Siagian (1981:21) menyatakan bahwa peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan yang diduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian suatu tujuan.

Dalam istilah Syamsir (2014:86), peranan adalah seperangkat tindakan yang diharapkan dimiliki oleh berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris, peranan disebut dengan “*role*” yang defenisinya adalah “*person task or duty in undertaking*” yang berarti “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peranan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diharapkan dimiliki oleh individu yang berkedudukan dimasyarakat. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang pada suatu peristiwa.

Dewi Wulansari (2009:106) juga mengemukakan bahwa peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan individu dalam masyarakat termasuk tuntutan tindakan sosial individu dan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Selanjutnya Soerjono Soekanto (2013:212) memaparkan

peranan yaitu proses dinamis dari peran atau kedudukan (status). Mereka berperan sesuai dengan hak dan kewajiban beserta kedudukannya, maka dia menjalankan peranan. Perbedaan antara posisi dan peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sebagaimana Ralph Linton yang dikutip oleh Soerjono Soekanto (2013:213) menyatakan, tidak ada peranan tanpa posisi atau posisi tanpa peranan. Seperti halnya kedudukan, peranan memiliki dua arti.

Maurice Duverger (2010:103) mengakui bahwa istilah “peran” (*role*) dipilih secara baik karena menyatakan bahwa setiap orang adalah aktor dalam masyarakat dimana dia tinggal, dan juga dia merupakan aktor yang harus memainkan peranan ganda seperti pada aktor profesional. Maurice Duverger (2010:102) juga menyatakan bahwa peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota lain dari masyarakat dari pemegang status, pada dasarnya adalah peranan hanyalah salah satu aspek status.

Ndraha menyatakan peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat sangat luas, mulai dari yang bersifat layanan operasional hingga yang bersifat ideologi dan spiritual, dengan peran pemerintah yang memiliki otoritas dan kapasitas individu untuk menjalankan tugas pokok beserta fungsinya sebagai seorang pemimpin, dikarenakan tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat dan lingkungan pemerintah dalam Sayafiie Inu Kencana (2011:110). Selanjutnya Rivai (2004:148) menjelaskan bahwa peran adalah perilaku individu yang diharapkan dapat membawa perubahan dan harapan untuk kemajuan, meski tidak selamanya sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya Rivai mengaitkan peran sebagai ukuran pencapaian

seseorang. Peran dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi seseorang sebagai pemimpin, terlepas dari apakah orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja saat menyelesaikan tugasnya ataukah tidak.

Didalam buku Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasi Suhardono (1994:3) bahwa makna kata “peran” yaitu sebenarnya dapat diartikan sebagai berikut:

1. Menurut penjelasan sejarah, konsep peran pada awalnya dipinjam dari golongan drama atau drama yang berkembang di zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam pengertian ini, peran adalah karakterisasi yang dimainkan oleh seorang aktor diatas panggung sebuah drama.
2. Penjelasan dari konotasi ilmu sosial, mengartikan bahwa peran sebagai fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu ciri (posisi) suatu struktur sosial.
3. Penjelasan operasional, menyebutkan peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan berbeda dalam satu “penampilan/unjuk peran”.

Oleh karena itu, defenisi peran yang merupakan serangkaian patokan yang membatasi tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi. Peranan dikatakan dinamisasi dari statis atau penggunaan pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran didefenisikan sebagai tugas atau penugasan kepada individu atau kelompok. Peranan ini memiliki aspek-aspek diantaranya berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang berkaitan dengan status atau orang-orang dalam masyarakat. Peranan dalam pengertian ini adalah seperangkat peraturan yang membimbing orang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan adalah konsep tentang apa yang dilakukan seorang individu sebagai organisasi dalam masyarakat.
3. Peranan dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2 Peran Pemerintah Desa

Peran pemerintah dalam pemberdayaan adalah memberikan bimbingan kepada masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan agar terciptanya kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah yang optimal dalam membangun masyarakat. Menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010:32) adapun peran pemerintah yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai Regulator

Menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010:32) mengemukakan peran pemerintah sebagai regulator adalah memberikan arahan untuk menyeimbangkan proses pembangunan melalui penerbitan peraturan. Sebagai regulator, Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai sarana untuk mengatur segala praktik pemberdayaan. Sedangkan teori yang digunakan Nugraha R. (2003:13) bahwa pemerintah sebagai regulator membuat aturan dasar sebagai kerangka/instrumen yang akan dijadikan sebagai landasan dasar untuk mengimplementasikan program pembangunan sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut lebih terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Selain itu apa yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010:32) juga telah ada teori terdahulu dikemukakan oleh Pitana dan Gayatri (2005:95) dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah memberikan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pembiayaan atau permodalan melalui pemberian dukungan bantuan modal kepada masyarakat yang berwenang. Selain pernyataan Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010:32) ada juga teori awal yang dikemukakan Parsons, Jorgensen, Hernandez

(1994:190-203) yang menyebutkan peran pemerintah sebagai fasilitator mengemukakan bahwa pemerintah sebagai fasilitator menyediakan kerangka standar yang baik memfasilitasi tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Selain itu, adapula pendapat dari Awaloedin dalam Tjokroamidjojo (1995:18) mengklasifikasikan peran pemerintah menjadi tiga kelompok:

1. Regulasi bekerja dalam bentuk pembuatan kebijakan, pemberian arahan dan bimbingan, pengaturan melalui perizinan dan pengawasan.
2. Pemilik sendiri dari usaha ekonomi atau sosial yang pengoperasiannya dapat dilakukan secara mandiri atau swasta.
3. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial.

Selain itu, dari Adsasmita (2006:11) yang membatasi peran pemerintah desa dalam pembangunan, yaitu perannya sebagai duta pembangunan, mengarahkan partisipasi masyarakat, dan pengarah aspirasi masyarakat. Peranan ini sangat berpengaruh, terutama dalam upaya membangkitkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat pedesaan.

2.3 Teori Kebijakan

Kebijakan biasanya digunakan untuk memilih dan menyajikan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan baik dalam kehidupan organisasi pemerintah maupun swasta. Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa dalam kata politis (*political*), hal ini sering dianggap memiliki makna keberpihakan

akibat adanya kepentingan. Kebijakan adalah keputusan valid dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten, dari yang membuatnya maupun yang mengikutinya (yang terkena kebijakan). Kebijakan publik (*public policy*) merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk pada keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah Sahya (2018:14).

Banyak dari para ahli yang menjelaskan tentang kebijakan, seperti Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan mendefenisikan kebijakan sebagai program untuk mencapai tujuan, nilai dan praktik yang terarah. Pengertian lain juga dijelaskan oleh Carl J. Friedrick yang bahwa kebijakan adalah seperangkat tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan. Pengertian lebih lanjut dijelaskan oleh James E. Anderson bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk memecahkan permasalahan. Disisi lain, Amara Raksasataya memberi pemahaman lain tentang kebijakan yaitu berupa taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memiliki tiga komponen yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai
2. Berbagai langkah taktik atau strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Memberikan masukan bersama untuk memungkinkan penerapan langkah taktik dan strategi yang sebenarnya. Banyak pakar yang mengajukan

defenisi kebijakan tidak memiliki masalah dalam menarik benang merah tentang kebijakan. Pengertian kebijakan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan khusus yang ingin dicapai. Tujuan khusus adalah tujuan yang melayani kepentingan umum (*interest public*).
2. Serangkaian tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah suatu strategi yang dirancang untuk memfasilitasi pencapaian tujuan dan acapkali diterjemahkan kedalam bentuk program dan proyek.
3. Tindakan yang diusulkan dapat berasal dari individu atau kelompok didalam ataupun diluar pemerintahan.
4. Memberikan masukan untuk implementasi strategi. Masukannya merupakan sumber daya manusia ataupun bukan dari manusia Suwitri (2008:5-6).

2.4 Pengertian Desa

Konsep desa telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Hal ini tentu saja, menunjukkan bahwa desa berbeda dari semua perspektif. Secara umum dapat diartikan bahwa desa merupakan suatu wilayah atau tempat tinggal yang dimana tempat tinggal tersebut masih terikat kuat dengan adat istiadat. Kata desa berasal dari kata india yakni “swadesi” artinya tempat asal, tempat tinggal, negara asal atau tanah leluhur, dan mengacu pada satu kesatuan kehidupan, dengan satu kesatuan norma dan batas yang cukup jelas (Yulianti Yayuk (2003:1)).

Secara singkat, istilah desa pertama kali dicetuskan oleh Mr. Herman Warner Muntinge, anggota dari Raad van Indie pada masa penjajahan Inggris, merupakan asisten Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811. Kemudian dalam laporan kepada pemerintahannya pada tanggal 14 Juli 1817 disebutkan bahwa desa didaerah sekitar pantai utara Jawa Wasistiono (2006:7).

Penjelasan lainnya sebagai pemerhati desa yaitu Bouman dalam Baratha, mengamati dari sudut pandangan mereka, desa adalah salah satu gaya hidup kuno yang dimana terdapat ribuan orang hidup bersama dan semua saling mengenal. Sebagian besar dari mereka mencari nafkah dari hasil pertanian, perikanan, dan sebagainya. Bisnis yang mungkin dipengaruhi oleh hukum atau kehendak alam. Selain itu, tempat tinggal memiliki banyak ikatan keluarga yang intim, kepatuhan terhadap tradisi dan aturan sosial Wasistiono (2006:8).

Mengenai pengertian desa diatas, Unang Sunardjo mengomentari desa dalam Wasistiono (2006:10) merupakan kesatuan masyarakat sah berdasarkan adat dan hukum adat yang tinggal di wilayah perbatasan tertentu dan memiliki karakteristik yang kuat, karena unsur keturunan maupun kepentingan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan lainnya, memilki struktur pemerintahan yang dipilih bersama, memiliki sebagian kekayaan, dan memiliki hak untuk menjalankan rumah tangga.

Penjelasan lain juga dikemukakan oleh Baratha dari Nurcholis (2011:4), merupakan nama asli desa atau yang setingkat adalah korporasi masyarakat, “korporasi” dan “pemerintah”, berdasarkan struktur aslinya. Selain itu, desa juga ditunjukkan oleh Teer Har dari Nurcholis (2011:4) sebagai satu kesatuan

masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dinyatakan sebagai kelompok teratur yang memiliki benda material maupun immaterial.

Dari uraian diatas bahwa dapat ditarik simpul desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdefinisi dengan baik yang hidup dalam suatu kawasan pemukiman yang saling berhubungan dan mengenal satu sama lain, mempunyai batasan wilayah tertentu serta memiliki suatu hak dan wewenang yang dapat mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat itu sendiri.

2.5 Pemerintah Desa

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali orang yang mencampuradukkan istilah pemerintah dan pemerintahan digunakan seolah-olah keduanya memiliki arti yang sama, meskipun memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Suryaningrat (1980), perbedaan istilah pemerintah dan pemerintahan, dijelaskan dengan kata lain, istilah pemerintahan mengacu suatu lembaga yang menyelenggarakan suatu fungsi dan pekerjaannya. Sedangkan istilah pemerintahan menunjuk pada suatu objek sedangkan istilah dari pemerintah menunjuk pada subjek. Artinya, kata pemerintah memiliki arti sempit dan luas. Di bawah konstitusi positif Indonesia saat ini (menurut UUD 1945), satu-satunya pemerintahan dalam arti sempit adalah presiden atau dalam bidang eksekutif. Dalam arti luas, mencakup *Trias Politica* atau Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Desa di Indonesia memiliki bentuk pemerintahan yang biasa disebut dengan pemerintahan desa. Pasal 1 ayat (2) UU Desa No. 6 Tahun 2014, menetapkan konsep desa bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian pemerintahan desa yang diuraikan oleh UU Desa No. 6 Tahun 2014, dapat dipahami bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan desa, yaitu:

1. Pemerintahan desa adalah pelaksana dari segala urusan pemerintahan
2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan kepentingan masyarakat
3. Pemerintahan desa termasuk dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 200 ayat (1) UU Tentang Pemerintahan Daerah 32 Tahun 2004, disebutkan dengan jelas bahwa pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan pemahaman pemerintahan desa dari pasal tersebut, pengertian pemerintahan desa dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dijelaskan pemerintah desa, menyebutkan atau menggambarkan mengenai penyelenggara pemerintahan desa, tanpa menjelaskan secara jelas tentang urusan apa saja yang secara yuridis dapat diselenggarakan oleh pemerintahan desa seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Maulidah (2015:19-20).

Perlu diketahui bahwa tugas utama dari lembaga negara adalah melaksanakan segala misi pemerintahan yang telah diserahkan atau disahkan oleh masyarakat kepada lembaga negara. Hal ini bertujuan untuk menjalankan segala macam fungsi layanan yang terdiri dari pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan/pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini disebut juga dengan fungsi pokok pemerintah sebagai

tindak lanjut dari fungsi dasar pemerintah yakni pelayanan. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan segala tugas pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat. Misalnya tahap merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, mengawasi, mengendalikan serta melaporkan sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemerintah desa Maulidah (2015: 39-40).

Sebagai sistem modern, pemerintah desa tidak cukup dengan menggunakan legitimasi simbolik dan sosial tetapi perlu membangun legitimasi dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah entitas masyarakat yang sah dengan struktur berdasarkan hak asal usul, dan dasar pemikiran pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Widjaja (2003).

Desa merupakan arena politik yang paling dekat hubungan masyarakat dengan penguasa (pemerintah desa). Pemerintah desa memiliki daftar tugas pemerintahan yang perlu dilaksanakan dengan peraturan yang ada, seperti melaksanakan birokratisasi di tingkat desa, melaksanakan dengan baik program pembangunan, serta memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok pemerintah desa adalah menyelenggarakan segala urusan pemerintahan (rumah tangga maupun umum) pembangunan pelayanan masyarakat serta pembinaan masyarakat berdasarkan kewenangan serta menjalankan tugas pembantu pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten Purnomo J. (2016:7).

Dalam hal ini pemerintah desa memiliki peran penting dalam pembangunan sebuah desa dimana kepala desa beserta jajarannya diberdayakan untuk melaksanakan atau mengontrol wilayah. Kedudukan yang sejajar dengan pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan mitra kerja sama pemerintah desa yang dimana dapat menjalankan suatu fungsi dan lembaga yang mengawasi jalannya pemerintah desa tersebut. Dari sudut pandang tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas utama, sebagai berikut:

1. Menyusun aturan (*legislating function*) yang dibutuhkan desa. Ini nantinya akan disetujui oleh perintah kepala desa.
 2. Membuat Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (*budgeting function*).
 3. Mengawasi eksekutif desa (kepala desa beserta jajarannya) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari (*controlling function*)
- Findy Y. Mamesah, Skripsi (2014:8).

Berdasarkan pasal 1 ayat (4) UU Tentang Desa No. 6 Tahun 2014, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut sebagai lembaga kemasyarakatan yang menjalankan fungsi pemerintahan dan anggotanya merupakan wakil masyarakat desa berdasarkan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa hal yang harus dipahami terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa, yakni:

1. Badan Permusyawaratan Desa memiliki nama lain
2. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang menjalankan fungsi pemerintah desa

3. Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari wakil penduduk desa berdasarkan wilayahnya
4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan secara demokratis Maulidah (2015:23-24).

Tentang keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, penjelasan dari Nurcholis (2011:77-78) tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diposisikan sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga penyelenggaraan pemerintah desa terdapat dua lembaga yakni Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa berfungsi sebagai melaksanakan kebijakan desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat.

Mengenai penjelasan diatas, bahwa pemerintah desa memiliki tugas yakni mengurus urusan pemerintah dan juga masyarakat setempat. Maka dengan ini, pemerintah desa juga harus siap siaga dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi dikemudian hari serta mampu berpikir dan bertindak secara rasional ketika membuat suatu keputusan dalam kehidupan masyarakat. Peran pemerintah desa menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat setempat karena pemerintah desa menjadi wadah masyarakat dalam mengatur urusan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah desa harus berperan baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun pelopor, dalam setiap gerakan pembangunan untuk mendukung penuh partisipasi masyarakat:

1. Sebagai dinamisator, dalam hal ini pemerintah desa adalah kepala desa dan harus membutuhkan kemampuan memberikan

bimbingan, pengarahan dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

2. Sebagai katalisator, hal ini terkait dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.
3. Sebagai pelopor, berarti pemerintah desa sebagai instansi pemerintah harus memiliki kewenangan tinggi, dan pemerintah desa harus mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi (loyalitas) tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik kepada masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani. Matondang. H (2013:4-7).

Selain bertugas untuk mengayomi masyarakat atas segala urusan, ternyata pemerintah desa juga menjalankan tindakan atau perilaku dalam mewujudkan pembangunan desa. Pembangunan desa ini bertujuan untuk membuat citra desa menjadi lebih unggul. Pembangunan desa ini adalah program dari Menteri Desa yang akan diberikan berupa bantuan untuk dikelola dengan baik agar terciptanya pembangunan desa yang baik pula. Tidak hanya itu, peran pemerintah desa tidak akan berjalan dengan baik tanpa memulainya dengan strategi. Inti dari konsep strategi adalah penyesuaian institusi, organisasi, atau badan pemerintah terhadap lingkungan eksternal. Lembaga atau organisasi yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan terhadap lingkungan eksternal maka akan mengalami kemunduran dan kegagalan. Dari perspektif manajemen, strategi adalah upaya untuk mengembangkan manfaat atau institusi dalam lingkungan eksternal yang sangat kompetitif untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

2.6 Pengertian Wisata Tani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008), wisata dapat diartikan sebagai berwisata bersama (mendapatkan ilmu, bersenang-senang dan sebagainya); tamasya; piknik. Disatu sisi, menurut Marpaung dari Jahid J. (2014:9), pariwisata adalah serangkaian interaksi antara wisatawan, perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan dan pemerintah serta masyarakat sebagai tuan rumah dalam proses menarik wisatawan dan memberikan layanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Republik Indonesia Tahun 2009 tentang kepariwisataan, wisata adalah kunjungan sementara ke suatu tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau studi tentang daya tarik wisata (Undang-Undang Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).

Penjelasan dari Gusti (2012:30) Agrowisata atau *Agroturisme* yakni pariwisata yang menggunakan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi, dan hubungan bisnis di bidang pertanian. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kawasan wisata tani merupakan suatu bentuk kegiatan pariwisata yang menggunakan pertanian sebagai daya tarik wisata yang memperluas ilmu pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan relasi usaha.

Pengembangan agrowisata diharapkan dapat sesuai dengan kapabilitas, tipologi, dan fungsi ekologi, yang berdampak langsung pada keberlanjutan sumber daya lahan dan pendapatan petani dan sekiat sekitar. Dengan demikian, kegiatan ini membawa peningkatan persepsi positif terhadap para petani dan masyarakat sekitar tentang pentingnya melestarikan sumber daya lahan pertanian. Pengembangan

agrowisata ini umumnya menciptakan sebuah lapangan kerja karena bisnis tersebut akan membutuhkan tenaga kerja dari pedesaan untuk menahan atau mengurangi arusbesar urbanisasi tinggi Gusti (2012:4-25).

Dengan pengembangan Agrowisata ini sebenarnya banyak mengundang keikutsertaan dari masyarakat pedesaan dengan penuh pengharapan besar dapat ditumbuh kembangkan serta memiliki rasa ikut memiliki untuk menjaga eksistensi dari obyek yang telah dibangun bersama-sama. Dibawah ini adalah peran dari masyarakat pedesaan menurut pendapat dari Gusti (2012:49-50):

1. Masyarakat desa yang memiliki tanah didalam kawasan yang dibangun agar tetap dapat digarap sehingga menunjang peningkatan hasil pertanian menjadi daya tarik agrowisata dan disisi lain akan mendorong rasa memiliki dan tanggungjawab dalam pengelolaan kawasan secara keseluruhan.
2. Dalam bidang pertanian maupun jasa pariwisata masyarakat desa terlibat langsung dalam kegiatan usaha sebagai tenaga kerja bisa menjadi pemandu dan sebagainya. Pengelola perlu mengambil langkah dan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja terampil dari masyarakat.
3. Memperkenalkan makanan khas dan memberikan fasilitas pertanian, kerajinan tangan dan souvenir serta lokasi penjualan kepada masyarakat sekitar kawasan wisata untuk menambah pendapatan. Selain itu, juga ada merupakan penampilan dari atraksi seni budaya lokal yang disajikan kepada wisatawan.

2.6.1 Faktor-Faktor Keberhasilan Agrowisata

Melihat bahwa ada beberapa peran yang telah dilakukan oleh masyarakat pedesaan demi mengembangkan Agrowisata kepada para wisatawan, maka dengan begitu adapun faktor yang berhubungan dengan keberhasilan agrowisata terkait dengan atraksi yang ditawarkan sebagai daya tarik, Syamsu dkk dalam Gusti (2012:54-55) mengemukakan bahwa faktor tersebut antara lain:

1. Kelangkaan

Artinya wisatawan yang berwisata ke kawasan agrowisata dapat mengharapkan berbagai suguhan seperti, perkebunan, persawahan ataupun taman yang mengandung unsur kelangkaan dikarenakan adanya sebuah tanaman atau keunikan yang khas yang jarang ditemukan.

2. Kealamiahian

Artinya adalah kealamiahian atraksi agrowisata akan sangat menentukan keberlanjutan dari agrowisata yang dikembangkan saat ini. Jika objek wisata yang disuguhkan tercemar atau punah atau penuh dengan kepalsuan maka hal ini akan membuat wisatawan tidak akan mengunjungi tempat itu lagi.

3. Keunikan

Artinya adalah sesuatu yang benar-benar berbeda dengan objek wisata yang ada. Keunikan yang dimaksudkan disini dapat berupa budaya, tradisi, dan teknologi lokalnya yang dimana objek wisata itu dikembangkan.

4. Perlibatan Tenaga Kerja

Pengembangan agrowisata diharapkan dapat melibatkan tenaga kerja setempat, setidaknya meminimalkan tergunanya masyarakat lokal akibat dari objek wisat.

5. Optimalisasi Pengguna Lahan

Lahan pertanian atau perkebunan diharapkan dapat memanfaatkan secara optimal, jika objek agrowisata ini dapat berfungsi dengan baik. Tidak ditemukan lagi lahan tidur, namun pengembangan agrowisata berdampak positif terhadap pengelolaan lahan, jangan juga dieksploitasi dengan semena-mena.

6. Keadilan dan Pertimbangan Pemerataan

Pengembangan agrowisata ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian seluruh masyarakat baik masyarakat petani atau masyarakat desa penanam.

Wisata Tani Panteng Kleset yang berada di Jl. Melati II merupakan wisata yang memanfaatkan keindahan alam sebagai bagian dari pembangunan desa. Keindahan alam yang berada pada wisata tani Panteng Kleset ini merupakan keindahan alam yang menggabungkan antara sungai dan juga persawahan masyarakat desa yang dimodifikasi untuk mewujudkan wisata sebagai pembangunan desa yang unggul. Pembangunan desa bukan hanya tentang infrastruktur, melainkan dapat mengelola keindahan alam yang ada pada desa tersebut, yang nantinya akan berdampak pesat pada pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat desa, dan lain sebagainya.

Banyak objek yang menjadi sorotan mata bagi wisatawan yang mengunjunginya, seperti patung-patung besar dengan gambar hewan, pondok-pondok yang dibuat dengan menarik, jembatan yang menghubungkan antar sisi sungai, dan sesekali sering diadakan atraksi demi memanjakan mata wisatawan. Memodifikasi lahan yang ada menjadi wisata adalah dengan menggunakan Dana Desa (DD) yang merupakan pendanaan dari Bank Dunia dari Program Inovasi Desa yang diciptakan oleh Kementerian Desa Republik Indonesia.

2.7 Pengertian Program Inovasi Desa (PID)

Desa adalah aspek terkecil negara. Desa mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Dalam menyelenggarakan pembangunan, dapat dikatakan masih memiliki keterbatasan yang terlihat jelas pada pemerintah desa, masyarakat, dan kualitas tata kelola dari desa, sehingga hal ini berdampak kepada perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan dari kegiatan pembangunan desa.

Melihat kondisi itu, Kementerian Desa Republik Indonesia Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) membentuk program yang dipercaya dapat menjadi solusi yang solutif dari keterbatasan tersebut, yakni melalui program bernama Program Inovasi Desa (PID). Program Inovasi Desa (PID) merupakan suatu program dari pemerintah yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang dimana hal ini dapat mengembangkan rencana dan pengembangan pembangunan desa. Berdasarkan Undang-Undang Program Inovasi Desa Nomor 48 Tahun 2018, Program Inovasi Desa bertujuan untuk mencapai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Program Inovasi Desa prioritas meningkatkan produktivitas dipedesaan dengan fokus pada:

1. Bidang pengembangan ekonomi daerah dan kewirausahaan, pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama), serta Produk Unggulan Desa (PruDes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) menjadi penggerak perekonomian desa;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Keterkaitan antara produktivitas pedesaan dan kualitas yang ingin dicapai diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka pendek dan diimplikasikan dalam jangka panjang melalui investasi di bidang pendidikan dasar dan kesehatan. Oleh karena itu, produktivitas pedesaan dilihat tidak hanya dari aspek/strategi peningkatan pendapatan, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan kehilangan potensi di masa yang akan datang. Selain itu, fokus pada isu Pelayanan Sosial Dasar (PSD) terkait kualitas sumber daya manusia juga dapat mendorong kesadaran desa terhadap isu-isu pendidikan dasar dan kesehatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa; dan
3. Terwujudnya peningkatan infrastruktur pedesaan, khususnya infrastruktur yang secara langsung mempengaruhi perkembangan perekonomian desa dan memperkuat kohesi sosial masyarakat pedesaan.

Dasar-dasar Program Inovasi Desa adalah:

1. Inovasi/kebaruan dalam praktik pengembangan dan pembagian pengetahuan. Inovasi ini berasal dari kenyataan/hasil upaya desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang dimanfaatkan secara luas; dan
2. Dukungan teknis dari penyedia jasa layanan teknis yang profesional.

Kedua elemen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), khususnya Dana Desa (DD). Oleh karena itu, program inovasi desa merupakan inovasi untuk memenuhi diharapkan kebutuhan desa akan pelayanan teknis yang berkualitas, merangsang munculnya inovasi dalam praktik pembangunan, dan solusi inovatif untuk menggunakan dana desa (DD) dengan tepat dan seefektif mungkin.

Dalam Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) Tahun 2018, inovasi desa merupakan hasil kerja desa dalam melaksanakan pembangunan desa, baik yang sudah ada maupun yang baru, berupa produk dan jasa yang dapat memberikan nilai berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur yang digambarkan sebagai proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman serta pengelolaan sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial budaya (Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Program Inovasi Desa Tahun 2018 Jakarta: Kementerian Desa PDTT).

2.7.1 Tujuan Program Inovasi Desa (PID)

Tujuan dengan diadakannya Program Inovasi Desa (PID) ini adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari dana desa (DD) dengan mengelola inovasi desa, meniru dan/atau mengadopsi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa yang inovatif, mendukung perluasan dari lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknik Desa (P2KTD). Dalam jangka menengah, diharapkan program inovasi desa dapat menekankan produktivitas dan perkembangan ekonomi desa serta pembangunan kapasitas desa secara terus-menerus. Dengan adanya Program Inovasi Desa (PID), diharapkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta kemandirian desa dapat ditingkat sejalan dengan sasaran KemDesa PD TT pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Kementerian Desa PD TT Nomor 4 Tahun 2019:9).

2.7.2 Manfaat Program Inovasi Desa (PID)

Adapun manfaat dari adanya Program Inovasi Desa (PID) ini adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas untuk mendukung dan memperkuat pembelajaran kegiatan inovatif untuk berbagi pengetahuan dan pengembangan masyarakat dengan desa lainnya
2. Fasilitas dan dukungan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih inovatif dan memenuhi prioritas kebutuhan masyarakat desa

3. Desa dapat menggunakan jasa layanan teknis untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembangunan dan pemberdayaannya, dan
4. Desa memiliki peluang dan akses untuk meningkatkan kapasitas kegiatan ekonomi.

Dijelaskan kembali bahwa dalam Keputusan Menteri Desa No. 38 Tahun 2017 yang menetapkan pedoman umum program inovasi desa bagi mereka yang terlibat dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program inovasi desa yang didani oleh *International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)* atau Bank Dunia.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian & Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Sumber
1	“Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Suka Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang” oleh Henny Aprianty, 2019	Kualitatif Deskriptif	Untuk mencari tahu Peran Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Suka Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, memutuskan menggunakan dua	Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi fokus penelitian yang dilakukan oleh Henny Aprianty. Kemudian, pada jurnal ini peneliti fokus kepada teori dari Oka	Jurnal

			<p>aspek kajian yaitu peran pemerintah yang dikemukakan oleh Oka A Yoeti (2001), yaitu organisasi yang telah diberikan wewenang dalam pengembangan pariwisata diwilayahnya harus dapat menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya karena fungsi dan tugas dari organisasi pariwisata pada umumnya yaitu memberikan kepuasan kepada wisatawan, melakukankoordinasi, memasyarakatkan, mengadakan program riset dan menyediakan fasilitas.</p>	<p>A. Yoeti (2001:148) yakni secara garis besar harus dapat menjalankan kebijakan untuk menguntungkan semua pihak.</p>	
2	<p>“Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoardjo).” Oleh Rizky Akbar Prasajo, 2015</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede memiliki porsi yang cukup seimbang. Pemerintah Desa berperan dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan</p>	<p>Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky Akbar Prasajo adalah memfokuskan kepada hubungan antar kedua peran yakni peran</p>	<p>Skripsi</p>

		<p>pertemuan-pertemuan membahas proses pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, memberi pengarah dan pembinaan, menyuplai dana pembangunan, menjadi pelopor dan inovator, serta memberikan berbagai dorongan kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan untuk ikut terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan dengan menyumbangkan usulan dan masukan terhadap pemerintah, melakukan pembangunan secara mandiri, mendukung pembangunan dalam bentuk nyata (tenaga dan harta benda), dan ikut serta dalam pengawasan pembangunan. Dalam hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola kerjasama yang terjadi antara pemerintah-</p>	<p>pemerintah dan juga peran masyarakat, selain itu juga dari skripsi ini peneliti membahas mengenai faktor pendukung-penghambat dari keberlangsungan proses pembangunan desa di Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoardjo. Kemudian adanya perbedaan pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>masyarakat cenderung bersifat mutualistik dimana kedua pihak menyadari posisi dan perannya masing-masing serta mendapatkan manfaat yang saling menguntungkan. Adapun faktor pendukung dari hubungan pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa Sedatigede yakni kesadaran masyarakat akan perannya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kesadaran akan kebersihan yang masih belum maksimal.</p>		
3	<p>“Efektivitas Program Inovasi Desa Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat.” Oleh Yuyun Maulida, 2018</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Program Inovasi Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat, sudah mulai dijalankan dengan mengacu pada upaya Kementerian desa PDTT dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pemanfaatan dana desa secara lebih berkualitas dengan</p>	<p>Perbedaan ini terletak pada teori yang digunakan oleh peneliti yakni menggunakan tujuan dari PID dan Efektivitas PID. Selain itu, peneliti membahas kepada bagaimana efektivitas PID ini dalam proses mewujudkan kemandirian desa.</p>	<p>Skripsi</p>

			<p>strategi pengembangan kapasitas desa secara berkelanjutan khususnya dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pelayanan sosial dasar, serta infrastruktur desa. Dalam mewujudkannya maka, sudah cukup berjalan, karena sebageian tujuan Kemandirian Desa akhir dari otonomi desa, maka upaya pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan. Proses pemberdayaan masyarakat desa sangat dipengaruhi terhadap Kemandirian Desa. Serta pengembangan kewirausahaan sudah terlaksan dan juga sarana dan prasananya yang sudah cukup memadai.</p>	<p>Kemudian Yuyun Maulida selaku peneliti juga melakukan penelitiannya di lokasi Kabupaten Langkat.</p>	
4	<p>“Pengembangan Kawasan Wisata Tani Betet Dalam Menghadapi <i>Era New Normal</i> Di Desa Betet Kecamatan Ngeronggot Kabupaten Nganjuk.” Oleh Widiartiningtyas</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Penutupan pertama dilakukan ketika terdapat kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada bulan Maret 2020, Kedua saat meningkatnya persebaran Covid19 pada</p>	<p>Perbedaan ini terletak pada lokasi penelitiannya , kemudian pada pa yang peneliti teliti yakni mengenai pengembang</p>	<p>Jurnal</p>

			<p>bulan Agustus hingga September 2020, dan ketiga saat masa libur natal dan tahun baru. Penutupan Kawasan Wisata Tani Betet dalam rangka menghindari kunjungan wisatawan pada libur natal dan tahun baru dimulai tanggal 24 Desember 2020 hingga tanggal 4 Januari 2021 (Yos, 2020), penutupan ini dilakukan sesuai dengan anjuran Bupati Nganjuk melalui Surat edaran (SE Bupati Nganjuk Nomor : 440/3362/411.010/2020 Tentang Penegakan Disiplin Pelaksanaan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Persebaran Covid-19 Di Kabupaten Nganjuk, 2020). Beberapa kali ditutupnya Kawasan Wisata Tani Betet menimbulkan dampak menurunnya tingkat kunjungan wisata meskipun Objek wisata telah dibuka kembali, hal ini menjadi tantangan tersendiri</p>	<p>n wisata tani pada masa <i>New Normal</i> yang mengakibatkan terjadinya penutupan yang membuat pengunjung sepi. Dan membuat segala upaya untuk menarik perhatian para wisatawan.</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>untuk Kawasan Wisata Tani Betet dalam mengembalikan kembali eksistensinya di dunia pariwisata. Salah satu cara yang dapat diambil pengelola Kawasan Wisata Tani Betet untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan pengembangan kembali kawasan wisata untuk menarik minat wisatawan.</p>		
5	<p>“Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Program Inovasi Desa Di Desa Uma Anyar Dan Desa Tejakula.” Oleh Ni Ketut Sudianing dan Gede Sandiasa, 2020</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Pelaksanaan program inovasi desa melalui penggunaan dana desa adalah mewujudkan pembangunan desa terpadu, berbasis sumber daya alam dan daya kreatif masyarakat, bersifat selektif dan berkelanjutan. Peran Program Inovasi Desa dalam pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat adalah pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia; dan pemenuhan dan peningkatan infrastruktur</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitiannya dan pembahasannya. peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana dana desa dalam menunjang PID.</p>	<p>Jurnal</p>

			<p>perdesaan. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan program inovasi desa sangat tinggi dalam bentuk kegiatan meliputi: pengembangan lembaga swadaya masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran dan pelaksanaan program inovasi desa, memberi kontribusi dalam bentuk iuran dan melaksanakan kegiatan solidaritas dan pengembangan swadaya gotong royong.</p>	
--	--	--	---	--

2.9 Kerangka Berpikir

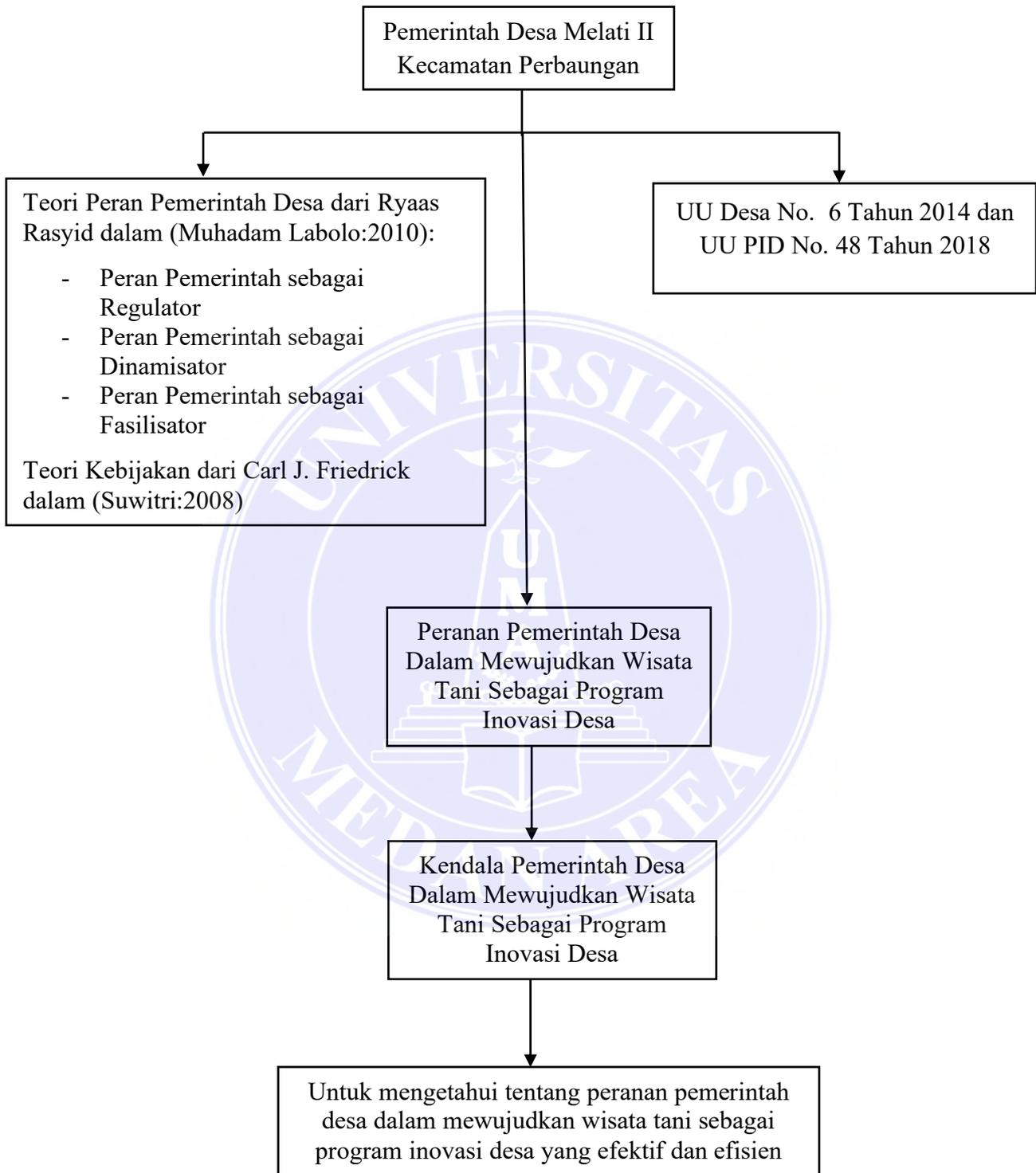
Uma Sekaran dari Sugiyono (2013:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan hubungan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan ketika penelitian tersebut berkenaan antar dua variabel atau lebih. Peneliti perlu menguasai teori ilmiah sebagai dasar penalaran guna mengembangkan kerangka hipotesis. Kerangka pemikiran adalah deskripsi sementara dari gejala yang dimaksudkan Suriasumantri, 1986 dalam Sugiyono (2013:60).

Kerangka pemikiran merupakan cara berpikir melalui nalar tertulis peneliti kearah memperoleh jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan dengan penalaran deduktif. Esensi kerangka pemikiran pada dasarnya adalah:

1. Memberi landasan ilmiah yang kuat dan relevan dengan masalah yang dikemukakan serta aspek-aspek yang berhubungan dengan latar belakang masalah.
2. Merupakan alur pikir peneliti dalam rangka untuk menjawab masalah yang didasarkan pada landasarn teori yang digunakan dan referensi lain didapat dari hasil penelitian yang relevan (terdahulu) secara logis.
3. Struktur logis (*logical construct*) menunjukkan dan menjelaskan masalah yang dirumuskan dalam kerangka teori.
4. Dibuat dalam bentuk model atau skema dalam bentuk bagan/gambar. Raihan (2017:71-72).

Berikut ini peneliti akan membuat berupa bagan dari penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar mengetahui secara konsep mengenai bagaimana alur dari penelitian yang dilakukan. Bagan tersebut adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran



Pada bagan diatas peneliti menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010:32) yang menyatakan bahwa peran pemerintah desa terbagi atas tiga, yaitu: a) Peran pemerintah sebagai regulator, b) Peran pemerintah sebagai dinamisator dan c) Peran pemerintah sebagai fasilitator. Dari ketiga peran pemerintah desa tersebut merupakan pisau analisis peneliti dalam melakukan penelitian yang memecahkan permasalahan, yaitu 1). Bagaimana peranan pemerintah desa dalam mewujudkan wisata tani sebagai program inovasi desa?, dan 2). Apa saja kendala pemerintah desa dalam mewujudkan wisata tani sebagai program inovasi desa?

Peneliti juga menggunakan teori kebijakan yang dikemukakan oleh Carl J. Friedrich untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah desa selanjutnya dalam pembangunan destinasi wisata tani ini. Program Inovasi Desa merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Republik Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2018. Program ini dianggap mampu dalam meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh desa-desa yang ada di Indonesia. Desa Melati II merupakan desa yang terverifikasi mendapatkan bantuan dari Kementerian Desa Republik Indonesia dan pemerintah desa memfokuskan Panteng Kleset menjadi tempat yang akan dikelola untuk dijadikan sebagai destinasi wisata tani berbasis lokal.

Untuk mengetahui hal ini, maka peneliti melakukan sebuah penelitian untuk mendapatkan berupa informasi atau data penting terkait penelitian yang dilakukan. Kemudian peneliti juga turun kelapangan untuk melihat secara langsung tentang lokasi wisata tani yang sudah terbengkalai tersebut. Serta melakukan wawancara kepada informan terpilih untuk mengetahui sejauh mana peran

pemerintah desa dalam mewujudkan wisata tani sebagai program inovasi desa yang efektif dan efisien.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian adalah suatu langkah untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban atas suatu masalah ilmiah. Penelitian menggunakan pemikiran reflektif dan ilmiah, dengan prosedur yang bergantung pada tujuan dan sifat survei. Namun, penelitian ini tidak dianggap sebagai cara untuk mengetahui kebenaran, melainkan dianggap sebagai upaya paling efektif bagi manusia untuk menemukan sesuatu yang baru Ibrahim (2003:22).

Penelitian kualitatif pada dasarnya digunakan dalam kaidah penelitian mikro ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada pemikiran induktif berdasarkan pada observasi objektif partisipatif terhadap suatu gejala sosial Aminuddin (1998:47).

Metode penelitian ini memakai metode deskriptif yang dipadukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan tentang bagaimana peranan pemerintah desa dalam mewujudkan wisata tani sebagai Program Inovasi Desa (PID) serta mendeskripsikan apa saja yang menjadi kendala pemerintah desa dalam mewujudkan wisata tani sebagai Program Inovasi Desa. Oleh karena itu, penelitian tersebut dikumpulkan, diselediki, dijelaskan, dan ditafsirkan secara jelas, dan ditarik dari survei yang dilakukan dalam bentuk data tentang masalah yang terjadi dilapangan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai serta di Kawasan Wisata Tani Panteng Kleset yang terletak di Jalan Desa Melati II.

3.3 Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mencantumkan jadwal penelitian sesuai yang tertera pada tabel berikut ini:

Table 3.1 Waktu Penelitian

No	Rangkaian Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1	Penyusunan Proposal											
2	Seminar Proposal											
3	Perbaikan Proposal											
4	Penelitian											
5	Penyusunan Skripsi											
6	Seminar Hasil											
7	Perbaikan Skripsi											
8	Sidang											

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat dipanggil ke dalam penelitian dengan informasi tentang apa yang terjadi di lapangan. Informan penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa informan penelitian mampu memberikan informasi dan yang selengkap dan relevan dengan tujuan penelitian Yayat (2017:11.2).

Menurut Hendarsono dalam Suyanto, informan survei meliputi tiga jenis:

1. Informan kunci (*Key Informan*), yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian.
2. Informan utama, yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan, yang dapat memberikan informasi tanpa terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti Suyanto (2005:171-172).

Berdasarkan uraian diatas, informan bukanlah ditentukan berdasarkan teknik *purposive* yakni artinya informan ditentukan bukan oleh spesifikasi atau representasi populasi, tetapi dengan menemukan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu informan kunci, mengukuti informan selanjutnya, dan kemudian mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Wisata Tani Sebagai Program Inovasi Desa Di Kecamatan Perbaungan. Untuk itu, yang dijadikan sebagai informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa Melati II Kecamatan Perbaungan, Sekretaris Desa Melati II Kecamatan Perbaungan serta masyarakat yang tergabung pada Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Informan kunci, berjumlah 1 (satu) orang yaitu Kepala Desa Melati II Kecamatan Perbaungan yaitu Bapak Supardi.
2. Informan utama, berjumlah 1 (orang) yaitu Sekretaris Desa Melati II Kecamatan Perbaungan yaitu Bapak Suherman, SH.
3. Informan tambahan, berjumlah 3 (tiga) orang yaitu masyarakat yang merupakan bagian dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yaitu Bapak Rahmat dan bagian dari BUMDesa Melati II Kecamatan Perbaungan yaitu Bapak Budiansyah serta Ibu Rismayanti selaku di Panteng Kleset saat masih beroperasi. Sondak (2019:7.1).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua cara, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data primer, pengumpulan data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung melalui:
 - a) Observasi, Edwards dan Tallbot mencatat *all good practitioner research studies start with observations* (semua studi penelitian praktisi yang baik dimulai dengan pengamatan). Observasi bisa dihubungkan dengan upaya: merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan dilapangan), pemahaman secara detail permasalahan (guna menemukan pertanyaan)

yang akan dituangkan kedalam kuesioner, ataupun untuk menemukan data strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat Edward (1994:77). Observasi ini akan dilakukan langsung di Kawasan Wisata Tani Panteng Kleset di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan.

- b) Wawancara, merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan secara langsung melalui kegiatan lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Bentuk terstruktur artinya adalah bentuk yang sudah diarahkan langsung pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Bentuk semi terstruktur yaitu sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan namun tidak menutup kemungkinan akan melahirkan pertanyaan baru. Tidak terstruktur yaitu peneliti hanya fokus terhadap pusat permasalahan. Wawancara ini akan dilakukan secara langsung oleh informan penelitian yakni Kepala Desa Melati II, Sekretaris Desa Mleati II, dan beberapa masyarakat Ibrahim (1985:82).
- c) Dokumentasi, dokumen adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk seperti tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya seperti catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*),

biografi, peraturan dan kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya ilmiah misalnya seperti karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Maka dalam hal ini, Bogdan dalam Sugiyono (2015:329) menyatakan mengenai dokumen adalah *“in most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experience and belief”*.

2. Pengumpulan data sekunder, pengumpulan data sekunder ini diperoleh dengan cara tidak langsung yakni melalui dokumen, arsip, serta data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dilapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data-data berdasarkan dari berbagai sumber yang ada, dilakukan secara terus menerus sehingga menemukan data yang akurat, kemudian melakukan pengamatan secara terus menerus.

Untuk dapat menganalisa fenomena yang terjadi dilapangan, maka terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti menurut Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, setelah data primer dan data sekunder telah terkumpul, maka selanjutnya dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai dengan bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman dalam satuan analisi, setelah itu kembali melakukan pemeriksanaa terhadap data kemudian mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti.
2. Penyajian data (*Display Data*), menyiapkan data dalam bentuk narasi, sehingga peneliti dapat menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah tersistematis.
3. Penarikan kesimpulan, tahap kesimpulan bermaksud ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh dilapangan secara akurat dan faktual dikutip dari Miles (1994:119).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penyajian data yang telah diperoleh, peneliti menarik simpulan tentang penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Teori peran yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid yakni peran pemerintah desa sebagai regulator, peran pemerintah desa sebagai fasilitator dan peran pemerintah desa sebagai dinamisator bahwa dapat dikatakan peran pemerintah desa Melati masih belum berjalan dengan baik disebabkan terjadi pada kurang efektifnya pemberian pemahaman kepada masyarakat setempat seperti melaksanakan sosialisasi mengenai sebuah program apa yang dijalankan serta pada dalam pengelolaan pendanaan untuk pembuatan destinasi wisata tani masih belum dikelola dengan baik. Dalam proses pembangunan wisata tani Panteng Kleset ini, pemerintah desa Melati II masih belum melaksanakan perannya dengan baik dikarenakan akses untuk menuju lokasi Panteng Kleset masih rusak, seharusnya permasalahan ini harus menjadi titik fokus pemerintah desa Melati II sebelum dibangun destinasi wisata tani Panteng Kleset.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Melati II dalam mewujudkan wisata tani Panteng Kleset ini adalah adanya wabah Covid-19 dan kurang baiknya peranan pemerintah desa dalam proses pembangunan wisata tani Panteng Kleset ini.

5.2 Saran

Melihat bahwa ada beberapa kendala yang menjadi permasalahan oleh pemerintah desa Melati II dalam mewujudkan wisata tani sebagai Program Inovasi Desa, maka peneliti akan memberikan sebuah saran, yakni sebagai berikut:

1. Bantuan dari Kementerian Desa Republik Indonesia harus dapat dikelola dengan baik, fokuskan pada proses pembangunan wisata tani Panteng Kleset sebagai tujuan dari Program Inovasi Desa yaitu memberikan kesejahteraan masyarakat serta membantu perkembangan UMKM masyarakat. Bantuan yang diberikan jangan digunakan untuk permasalahan Covid-19, sehingga apabila terjadi permasalahan pada wisata tani dapat segera diperbaiki.
2. Harus intens dalam memberikan pengarahan, bimbingan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dengan penuh program yang dikerjakan karena mayoritas riwayat pendidikan masyarakat di Desa Melati II rendah, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang bersikap tidak peduli dengan adanya wisata tani ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aminuddin. (1998). *Mengenai Keragaman Paradigma dan Strategi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Sastra dan Bahasa*. Malang: FPBS HIP Malang.
- Barger, P. d. (1982). *Realitas Konstruktif Sosial Diterjemahkan oleh Syarwani, dkk.* Jakarta: Sinar Harapan.
- Buku Pedoman Umum Pelaksanaan Program Inovasi Desa Tahun 2018 Jakarta: Kementerian Desa PDTT. (n.d.).*
- Dahlan, A. (1999). *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi.
- Donnelly, G. I. (2002). *Organisasi Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Duverger, M. (2010). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edward, T. R. (1994). *The Hard Press Researcher*. London: Longman.
- Gibson. (2002). *Organisasi Perilaku Struktur Proses Terjemahan Edisi V*. Jakarta: Erlangga.
- Gusti, I. (2012). *Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif Di Indonesia*. Denpasar.
- Ibrahim, A. S. (1985). *Penelitian Dengan Teori Grounded*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ibrahim, A. S. (2003). *Pengumpulan dan Teknik Analisis Data Kualitatif*. Malang: UM Malang.
- Jahid, J. (2014). *Perencanaan Kepariwisata*. Makassar: Alauddin University Press.
- KBBI. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Pustaka Utama .

Kementerian Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2019.

Kencana, S. I. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Rineka.

Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.

Maulidah, R. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zafana Publishing.

Miles, M. B. (1994). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.

Nana Syaodih, S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugraha, R. (2003). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Parsons, H. J. (1994). *Integrasi dan Praktek Kerja Sosial*. California: Brooks Cole.

Pitana, G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Purnomo, J. (2016). *Buku Saku UU: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.

Purnomo, J. (2016). *Seri Buku Saku UU: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.

Purnomo, Y. Y. (2003). *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: Fokusmedia.

Rahyunir, M. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zefana Publishing.

Raihan. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.

Rivai, V. (2004). *Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .

Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*. Jakarta: Gramedia.

Riyadi. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

S.P, S. (1981). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Masagung.

- Sahya, A. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2013). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, E. (1994). *Teori Peran Konsep Derivasi dan Implikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryaningrat, B. (1980). *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sutarto. (2009). *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Suyanto. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Syamsir, T. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Syani, A. (1994). *Sosiologi: Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tahir, W. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Tjokroamidjojo, B. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

- Wasistiono, T. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, D. (2009). *Sosiologi: Konsep dan Teori*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yulianti Yayuk, M. P. (2003). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Jurnal:

- Akib, Karmila, Olfie Alfionita Teparé. "Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso". *Jurnal Ilmiah Administratie* 8.1 (2020): 29-32.
- Matondang, H. (2013). *Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. E-Journal, 4-7.
- Pendong, Alesandro; Singkoh, Frans; Pangemanan, Fanley. *Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Gunung Payung Di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Eksekutif*, 2020, 2.5.
- Sondak, S. H. (2019). *Faktor-faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. EMBA, 7.
- Yayat, R. (2017). *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu*. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 11.

Skripsi:

- Fifianti. (2018). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mamesah, F. Y. (2014). *Peranan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompasso*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Ratulangi Manado.
- Rizky Akbar Prasajo. (2015). *Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten*

Sidoardjo). Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sidoardjo.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Pemerintah RI Tentang Kepariwisataaan Nomor 10 Tahun 2009

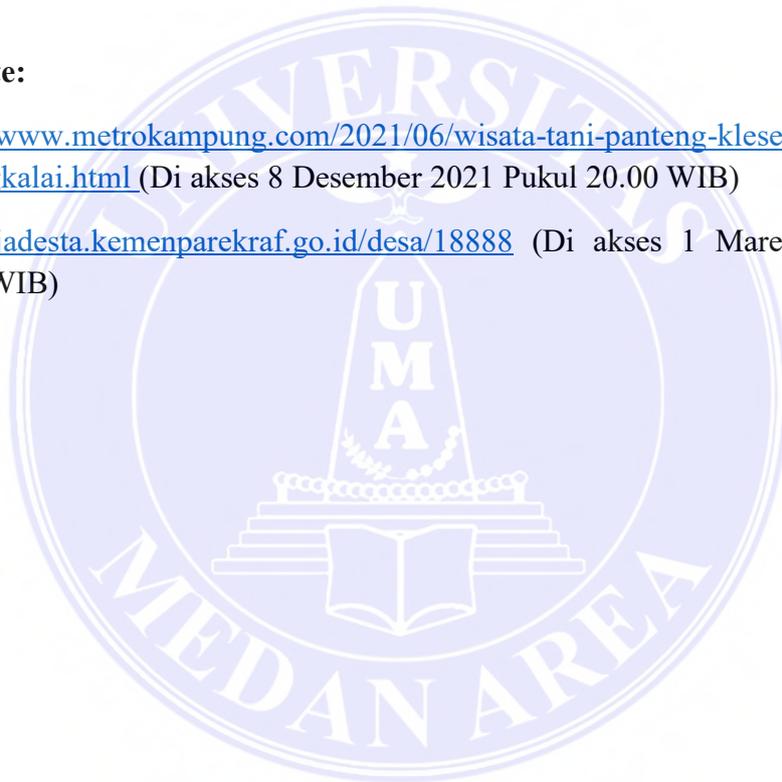
Undang-Undang Tentang Program Inovasi Desa Nomor 48 Tahun 2018

Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004

Website:

<https://www.metrokampung.com/2021/06/wisata-tani-panteng-kleset-terbengkalai.html> (Di akses 8 Desember 2021 Pukul 20.00 WIB)

<https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/18888> (Di akses 1 Maret 2022 Pukul 10.15 WIB)



LAMPIRAN

6.1 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi akurat yang ditujukan kepada informan-informan terpilih yang dipilih oleh peneliti dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Peranan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Wisata Tani Sebagai Program Inovasi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara”. Berikut ini merupakan daftar pertanyaan wawancara dengan menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid, yaitu:

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Bagaimana peranan pemerintah desa sebagai Regulator dalam mewujudkan wisata tani sebagai program inovasi desa yang merupakan program dari Kementerian Desa Republik Indonesia?

2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Bagaimana peranan pemerintah desa sebagai Dinamisator dalam mewujudkan wisata tani sebagai program inovasi desa yang merupakan program dari Kementerian Desa Republik Indonesia?

3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Bagaimana peranan pemerintah desa sebagai Fasilitator dalam mewujudkan wisata tani sebagai program inovasi desa yang merupakan program dari Kementerian Desa Republik Indonesia?

4. Kendala Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Wisata Tani Panteng Kleset

- a) Apa yang menjadi kendala Pemerintah Desa dalam mewujudkan Wisata Tani Panteng Kleset?
 - b) Jika kedua kendala tersebut adalah kendala yang signifikan, lantas mengapa Panteng Kleset bisa mengalami kerusakan yang sangat parah? Apakah tidak adanya tim keamanan yang dikirim untuk menjaga destinasi tersebut?
 - c) Apa kebijakan pemerintah desa selanjutnya jikalau keadaan dan pendanaan kembali normal?
 - d) Apakah sering terdengar keluhan kesah dari masyarakat akibat tutupnya destinasi ini?
5. Pertanyaan untuk masyarakat
- Seberapa berpengaruh atau adanya destinasi wisata tani Panteng Kleset ini bagi para penjual yang ada di area Panteng Kleset?

6.2 Dokumentasi Bersama Informan

Gambar 5.1 Foto bersama Kepala Desa Melati II



Gambar 5.2 Foto bersama Sekretaris Desa Melati II



Gambar 5.3 Foto bersama Ketua BPD Melati II



Gambar 5.4 Foto bersama Sekretaris BUMDesa Madani Melati II



Gambar 5.5 Foto bersama Ibu Rismayanti



6.3 Potret Wisata Tani Panteng Kleset

Gambar 5.6 Potret Panteng Kleset



Gambar 5.7 Potret Panteng Kleset



Gambar 5.8 Potret Panteng Kleset



BIODATA INFORMAN

1. Informan Kunci

Nama : Supardi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 49 Tahun
Jabatan : Kepala Desa Melati II

2. Informan Utama

Nama : Suherman, SH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 38 Tahun
Jabatan : Sekretaris Desa Melati II

3. Informan Tambahan

Nama : Rahmat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 41 Tahun
Jabatan : Ketua BPD Desa Melati II

Nama : Budiansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 30 Tahun
Jabatan : Sekretaris BUMDesa Madani Desa Melati II

Nama : Rismayanti
Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 39 Tahun

Pekerjaan : PRT (Pekerja Rumah Tangga)

